

Polisi Telusuri Peran Pejabat Pemkot

● Kasus Kas Daerah Rp 22,7 Miliar

SEMARANG SELATAN - Pejabat Pemkot Semarang yang menerima aliran uang terkait raibnya dana kas daerah Rp 22,7 miliar di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) akan diperiksa. Para penerima uang puluhan miliar itu akan segera diketahui. Mereka yang terlibat akan diperiksa Polrestabes Semarang.

"Tinggal menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kami masih terganjal itu," ungkap Kapolrestabes Kombes Burhanudin, Jumat (12/6). Jika hasil audit sudah diketahui, lanjut dia, tentunya akan memudahkan polisi untuk mengembangkan penyelidikan penyelewangan dana tersebut.

"Kami tidak mau berandai-andai. Sesuai fakta saja, kalau ada yang terlibat tentu akan kami tangkap," ujarnya. Polisi tidak asal melangkah dalam menentukan siapa yang terlibat. Sebab, lanjut dia, kasus tersebut sensitif, maka membutuhkan penanganan yang ekstra hati-hati.

"Hasil audit keluar, kami bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) langsung melakukan penelusuran. Dananya lari ke mana saja, ditransfer ke rekening siapa saja," jelasnya.

Disinggung kemungkinan ada

tersangka lain selain mantan karyawan BTPN Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kas Daerah Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Suhantoro, Kapolrestabes menyatakan belum ada. "Tersangka masih dua orang, belum ada tersangka baru," jelasnya.

Direncanakan Rapi

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, menduga, kasus yang masuk ke ranah korupsi itu diduga sudah disusun dan direncanakan rapi. Sebab, dugaan penyelewangan dana berjalan rapi sejak 2007 dan baru terbongkar pada 2014.

"Kami menduga ada aktor intelektual di balik ini. Bukan Dyah yang menjadi pelaku utama," ungkap Eko.

Apalagi, lanjut dia, Dyah bukan PNS sehingga kemungkinan untuk menyelewangkan dana tersebut sebagai tokoh utama sangat kecil. "Penyidik harus mengusut ini dan lebih berani untuk membongkar aktor intelektualnya. Ini kejahatan berstruktural," ujarnya.

(Bersambung hlm 24 kol 2)

Polisi...

(Sambungan Hal 21)

Pakar ekonomi Universitas Diponegoro Prof Purbayu Budi Santosa mengatakan, penyidik harus bergerak cepat dan tidak menunda untuk menelusuri bukti transaksi melalui PPATK.

"Kalau dikerjakan serius pasti mudah diketahui, dana lari ke mana dan kepada siapa," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, penyidik harus meminta keterangan lebih mendalam kepada dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu. "Itu hal yang mendasar dan sangat penting," ungkapnya. (K44,H74-43)